



## Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes 2024 di Desa Sowanlor, Jepara

Lestari Widiah Ningsih<sup>1\*</sup>, Lingga Yuliana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Terbuka, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Paramadina, Indonesia

Korespondensi penulis: [lestariwidiahningsih02@gmail.com](mailto:lestariwidiahningsih02@gmail.com)\*

**Abstract.** *This study aims to analyze the implementation of the principles of transparency and accountability in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Sowanlor Village, Kedung Sub-district, Jepara Regency, in 2024. The research method used is descriptive qualitative analysis, with a focus on secondary data analysis. The main focus of this research is to assess the extent to which transparency and accountability principles are applied in the planning, implementation, and evaluation phases of the APBDes by the village government. The results indicate that although the village government has made efforts to disseminate financial information and involve the community in budget planning, there are still obstacles related to information openness and public participation. The delivery of financial information is considered insufficiently detailed and not easily understood, while community participation in program monitoring and evaluation remains limited. This study recommends that the village government enhance the quality of financial information disclosure to be more transparent and accessible to the public. Additionally, it is essential to strengthen community involvement in all stages of village budget management, including implementation and evaluation, in order to foster more transparent and accountable village financial governance.*

**Keywords:** *Accountability; APBDes; Transparency*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Sowanlor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan teknik analisis data sekunder. Fokus penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pertanggungjawaban APBDes oleh pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemerintah desa untuk menyampaikan informasi keuangan dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran, masih terdapat kendala terkait keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat. Penyampaian informasi keuangan dinilai belum cukup rinci dan mudah dipahami, sementara partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program masih terbatas. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah desa lebih meningkatkan kualitas penyampaian informasi keuangan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, penting untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan anggaran desa, termasuk pelaksanaan dan evaluasi, guna menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci :** Akuntabilitas; APBDES; Transparansi

### 1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sumber utama keuangan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan langsung ke desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan hak kepada desa untuk menerima hingga 10% dari anggaran kementerian atau lembaga terkait desa, yang disalurkan secara bertahap. Penggunaan dana desa diarahkan berdasarkan kewenangan desa dan prioritas kebutuhan masyarakat yang berlandaskan asas keadilan (Amin, 2023).

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan landasan penting dalam pengelolaan dana desa. Transparansi menjamin keterbukaan akses terhadap informasi kebijakan dan hasil pelaksanaan program pemerintah, sementara akuntabilitas menekankan pada tanggung jawab penggunaan dana secara efektif dan efisien (Raharjo, 2021). Kedua prinsip ini memungkinkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada masyarakat secara jujur dan terbuka.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat pengelolaan dana desa secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini berdampak pada ketimpangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur serta potensi penyalahgunaan dana publik (Anas, 2024). Ketidakterbukaan dalam pelaporan keuangan dan minimnya pelibatan masyarakat sering kali menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa.

Menurut Setianingsih et al. (2022), penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting agar dana desa dapat digunakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pemanfaatan dana desa agar tercipta tata kelola yang baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024 di Desa Sowanlor, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Studi ini berfokus pada sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Fenomena lemahnya akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur di desa ini menjadi latar belakang utama penelitian.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Prinsip Transparansi**

Transparansi dalam pengelolaan dana desa merujuk pada keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan akses informasi yang luas kepada masyarakat terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dengan dasar bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan secara jelas dan menyeluruh (Subarjo, 2023). Menurut Sitepu (2022). Transparansi didasarkan pada prinsip kebebasan memperoleh informasi yang relevan dengan kepentingan publik, yang dapat diakses secara langsung oleh pihak yang membutuhkan. Dengan demikian dapat disimpulkan transparansi merupakan prinsip penting dalam tata kelola yang baik, ditandai dengan keterbukaan informasi

dan kemudahan akses bagi semua pihak yang berkepentingan. Melalui transparansi, penggunaan sumber daya dan dana dapat diawasi secara adil, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

### **Prinsip Akuntabilitas**

Akuntabilitas umumnya diartikan sebagai proses pemberian pertanggungjawaban atas layanan atau tindakan yang telah dilaksanakan. Konsep ini menekankan bahwa seseorang atau suatu pihak wajib memberikan penjelasan dan laporan kepada pihak lain yang secara sah berhak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Fitriani, 2022). Menurut (Ana & Linda Lomi Ga, 2021) akuntabilitas adalah kewajiban pimpinan, pejabat, atau pelaksana untuk memberikan laporan secara berkala kepada pihak yang berhak atas kinerja dan tindakan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian simpulan mengenai akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berwenang secara transparan dan periodik (Thybah et al., 2024). Konsep ini menekankan pentingnya pelaporan yang jujur dan sistematis guna memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan tepat sasaran.

### **Pengelolaan APBD**

Pengelolaan merupakan proses manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam pengelolaan dana desa (Saidah & Fatmawati, 2023) Tujuannya adalah menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui enam tahapan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan (Ega et al., 2025; Oktavia et al., 2025). Setiap tahap menekankan pentingnya kolaborasi antar tingkat pemerintahan, partisipasi masyarakat, dan prinsip transparansi & akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan desa.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa telah menjadi fokus beberapa penelitian sebelumnya (Kartika Sari & Widyawati, 2021) menemukan bahwa di Desa Karangwedoro, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan, terutama dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan yang mengikuti pedoman dan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, pelaksanaan perencanaan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal sosialisasi informasi mengenai perbedaan dan besaran antara ADD dan Dana Desa (DD).

Selain itu, pelaporan keuangan juga mengalami keterlambatan yang tidak sesuai dengan ketentuan waktu pelaporan yang ditetapkan (Afrianda & Yuliana, 2025; Takih & Yuliana, 2025).

Sementara itu, penelitian oleh Saidin & Rinanda (2022), menyoroti pelaksanaan transparansi melalui penyebaran informasi menggunakan spanduk dan situs web desa, serta pelaporan keuangan yang telah dilakukan secara tepat waktu. Namun, terdapat kendala pada aspek transparansi pendapatan, khususnya dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang bersumber dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang belum tercantum dalam laporan realisasi APBDes. Dalam hal akuntabilitas, pelibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan desa telah diterapkan guna mendukung pengelolaan APBDes yang lebih partisipatif.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merujuk pada langkah-langkah yang dilakukan secara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat yang spesifik (Naufal & Yuliana, 2025; Poetry et al., 2025; Ryan & Yuliana, 2025). Dalam konteks penelitian, metode penelitian adalah proses ilmiah yang berkaitan dengan studi mendalam terhadap suatu subjek atau objek penelitian untuk mendapatkan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sah (Fitria & Yuliana, 2025; Jasmine et al., 2025; Zahrah & Yuliana, 2025). Pengembangan di sini mengacu pada usaha untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada sebelumnya (Athallah et al., 2025; Humaira et al., 2025; Kamaliyah et al., 2025). Penemuan dalam konteks penelitian mengacu pada informasi baru yang ditemukan melalui penelitian, informasi ini sebelumnya belum pernah ada (Kafiyan et al., 2025; Sugiono et al., 2025; Utama & Yuliana, 2025). Sementara pembuktian mengacu pada penggunaan informasi yang ditemukan melalui penelitian untuk menguji kebenaran atau keraguan terhadap pengetahuan tertentu (Alfian et al., 2025; Sabilla & Yuliana, 2025; Tarisca et al., 2024). Dalam memperoleh informasi, peneliti meminta bantuan informan yang telah memberikan informasi untuk memilih orang-orang yang dianggap mempunyai pengetahuan yang dibutuhkan (Kurniaty et al., 2023; Salsabila et al., 2025; Yuliana et al., 2025). Prosedur yang digunakan untuk memperoleh informan tersebut adalah dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu menentukan informan yang dipilih secara sengaja oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu (Parashakti et al., 2024)

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Sowanlor merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah desa ini memiliki luas sekitar 3,112 kilometer persegi dengan total jumlah penduduk sebanyak 8.053 jiwa. Penduduk tersebut terdiri atas 4.046 laki-laki dan 4.007 perempuan, serta mencakup 3.185 kepala keluarga. Secara administratif, Desa Sowanlor terbagi menjadi 5 dukuh, 14 Rukun Tetangga (RT), dan 4 Rukun Warga (RW). Berdasarkan letak geografisnya, desa ini berbatasan langsung dengan Desa Dongos di sebelah utara, Desa Ngeling di sebelah timur, Desa Sowan Kidul di sebelah selatan, serta Desa Bugel dan Desa Wanusobo di sebelah barat. Dengan komposisi penduduk yang cukup seimbang serta pembagian wilayah yang tertata, Desa Sowanlor memiliki potensi untuk terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sowanlor.

##### **Perencanaan**

Pemerintah Desa Sowanlor telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan pelayanan publik, meskipun masih terdapat beberapa batasan. Pihak desa berpendapat bahwa tidak semua informasi pemerintahan desa perlu dibuka untuk publik. Meskipun demikian, Menurut (Sufiqri & Achmad, 2023) transparansi dapat diukur melalui mekanisme keterbukaan dan penerapan standar dalam proses pelayanan, dan berdasarkan observasi, indikator transparansi telah diterapkan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya.

##### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan keuangan desa mengharuskan penerapan beberapa prinsip umum yang meliputi penerimaan dan pengeluaran, di mana seluruh transaksi keuangan desa harus dilakukan melalui Rekening Kas Desa dan mematuhi aturan yang berlaku.

##### **Evaluasi dan Pertanggungjawaban**

Evaluasi dan pertanggungjawaban terkait pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan dengan baik. Laporan pertanggungjawaban ini tidak hanya disampaikan kepada pemerintah kabupaten, tetapi juga kepada masyarakat. Pemerintah desa memberikan pertanggungjawaban kepada Bupati dan kepada masyarakat desa melalui laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan yang digunakan oleh Pemerintah Desa Sowanlor untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran. Sebelum APBDes ditetapkan, pemerintah desa terlebih dahulu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), yaitu dokumen perencanaan pembangunan jangka lima tahunan yang disusun dan ditetapkan oleh kepala desa paling lambat tiga bulan setelah menjabat. Penyusunan RPJM Desa melibatkan proses partisipatif melalui Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Dokumen RPJM Desa ini kemudian dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yaitu rencana kerja tahunan pemerintah desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa. RKP Desa disusun dan disepakati melalui forum musyawarah desa dan Musrenbangdes dengan mempertimbangkan kembali skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah RKP Desa disetujui, pemerintah desa menyusun rencana anggaran tahunan yang dituangkan dalam dokumen APBDes. Dalam tahap pelaksanaannya, laporan realisasi APBDes akan menyajikan rincian penerimaan dan pengeluaran anggaran yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa secara transparan.

**Tabel 1. Realisasi Pelaksanaan APBDES Desa Sowanlor Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2024**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
4.1	Pendapatan Asli Desa	322.960.000.00
4.2	Pendapatan Transfer	2.655.334.000.00
4.3	Pendapatan lain-lain	9.000.000.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.987.294.000.00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	
5.1	Belanja Pegawai	837.104.000.00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.107.367.000.00
5.3	Belanja Modal	1.269.280.400.00
5.4	Belanja Tidak Terduga	126.336.600.00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.340.088.000.00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(352.794.000.00)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	352.794.000.00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	352.794.000.00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>352.794.000.00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0.00</b>

**Sumber : Pemerintah Desa Sowanlor (2025)**

Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang telah disampaikan, diketahui bahwa Pemerintah Desa Sowanlor menganggarkan pendapatan sebesar Rp2.987.294.000,00. Namun, dalam pelaksanaannya, pendapatan yang terealisasi mencapai Rp3.340.088.000,00. Dengan demikian, terdapat selisih surplus pendapatan sebesar Rp352.794.000,00 dari jumlah yang

dianggarkan. Sementara itu, pada tahun anggaran 2024, pemerintah desa tidak memiliki Sisa Lebih atau Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA), dengan nilai tercatat sebesar Rp0,00.

## Pembahasan

### Transparansi Perencanaan APBDES

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah desa berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa berupaya menunjukkan transparansi dengan memberikan masyarakat kesempatan dan akses terhadap informasi terkait operasional dan keuangan desa. Salah satu indikator transparansi perencanaan APBDES di Desa Sowanlor yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

#### **Adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan APBDES melalui media informasi**

Pemerintah desa menyampaikan informasi mengenai besarnya pendapatan dan belanja desa selama satu tahun anggaran melalui pemasangan spanduk di depan kantor desa. Namun, untuk kebijakan dan program-program desa, informasi tidak disampaikan melalui media informasi, melainkan disosialisasikan melalui forum musyawarah dusun saat penyusunan RPJM yang menjadi dasar bagi penyusunan APBDES. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Muh. Hadiyanto, pada tanggal 22 April 2025, diketahui bahwa meskipun kebijakan serta pelaksanaan APBDes tidak secara langsung dibahas bersama masyarakat melalui forum musyawarah, informasi terkait anggaran dan pendapatan desa tetap disampaikan secara terbuka. Penyampaian informasi dilakukan melalui pemasangan spanduk di kantor desa serta publikasi di internet. Selain itu, tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi masyarakat turut menerima informasi tersebut.



**Gambar 1. Website dan spanduk APBDES 2024 Keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan program dan kegiatan, serta keterlibatan masyarakat secara langsung**

Hal ini sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan. Setiap kegiatan pemerintah harus melibatkan masyarakat secara langsung dan memberikan informasi yang jelas mengenai

kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam wawancara yang dilakukan pada 22 April 2025, Kepala Desa Bapak Muh. Hadiyanto menyatakan: “Setiap kali ada kegiatan, kami melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja, sehingga pembangunan infrastruktur dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat desa. Keterbukaan informasi di desa membuat mereka mengetahui bahwa program kegiatan tersebut melibatkan masyarakat, dan setiap kegiatan juga dipasang papan informasi sebagai bentuk transparansi.”

### **Ketepatan waktu dalam menyampaikan dokumen dan laporan pertanggungjawaban sangat penting dalam memastikan kelancaran proses transparansi.**

Pemerintah Desa Sowanlor mengakomodasi suara masyarakat melalui berbagai saluran, seperti RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD, dan LKMD, yang dapat menyampaikan aspirasi mereka. Informasi yang disampaikan melalui saluran-saluran tersebut kemudian diproses dalam Musyawarah Desa (Musdes) bersama pemerintah desa. Dalam wawancara yang dilakukan pada 01 Maret 2022, Kepala Desa Bapak Rohmad menyatakan: “Selama ini, kami menyampaikan informasi melalui infografis dan juga dalam Musdes. Setiap kegiatan disampaikan melalui infografis, dan dalam Musdes, yang dihadiri oleh RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta BPD dan LKMD, informasi dapat disampaikan dan diterima dengan baik. Musdes biasanya kami lakukan minimal tiga bulan sekali.”

Pemerintah Desa Sowanlor telah berupaya membuat perencanaan APBDES yang transparan kepada masyarakat. Meskipun tidak ada dokumentasi yang dapat diperlihatkan, masyarakat selalu terlibat dalam pelaksanaan dan pengambilan kebijakan. Desa Sowanlor juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran, baik secara langsung maupun melalui perwakilan seperti RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD, dan LKMD.

### **Akuntabilitas Perencanaan APBDES**

Perencanaan APBDES di Desa Sowanlor dilakukan dengan jelas melalui proses musyawarah untuk mengambil keputusan terkait kebijakan dan program pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, pedoman pembangunan desa berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan desa. Kepala Desa Bapak Muh. Hadiyanto menjelaskan bahwa tahapan perencanaan APBDES dimulai dengan Musyawarah Dusun (Musdus), yang melibatkan masyarakat setempat untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM). Selanjutnya, hasil RPJM ini digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang kemudian menjadi

pedoman dalam menyusun APBDES. Semua pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan APBDES**

Dalam hal keterlibatan masyarakat, Pemerintah Desa Sowanlor berusaha mengakomodasi semua adat istiadat yang telah disepakati oleh masyarakat dan mempertahankannya dalam setiap Musdus. Pemerintah desa juga terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih aktif berpartisipasi, mengingat peran penting masyarakat dalam pemerintahan desa. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya maksimal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali Farchan, Ketua BPD, pada 22 April 2025, beliau menyatakan: “Setelah usulan masyarakat diterima oleh BPD, usulan tersebut akan disampaikan ke Musdes untuk diverifikasi. Jika usulan tersebut menjadi prioritas, maka akan dilaksanakan tahun ini atau tahun depan. Namun, partisipasi masyarakat yang rendah, suara yang monoton, dan kurangnya pendataan di lapangan menyebabkan pemerintah desa kesulitan dalam menyusun anggaran dengan optimal.”

Laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dibuat secara langsung setelah setiap kegiatan selesai dilaksanakan, sehingga laporan tersebut dapat disusun tepat waktu. Kepala Desa Bapak Muh. Hadiyanto menjelaskan pada wawancara tanggal 22 April 2025, “Selama ini, setiap laporan pertanggungjawaban dibuat segera setelah pekerjaan selesai, dan laporan tersebut diketahui oleh BPD dan PPKD. Dengan demikian, pelaporan pertanggungjawaban selalu tepat waktu.”

Pemerintah Desa Sowanlor melibatkan masyarakat dalam pengelolaan APBDES dengan melaksanakan kegiatan di wilayah mereka. Kepala Desa Bapak Muh. Hadiyanto menjelaskan pada wawancara tanggal 22 April 2025, “Jika anggaran digunakan untuk pembangunan, maka masyarakat di wilayah tersebut dapat melakukan swakelola dan berpartisipasi langsung dalam pembangunan tersebut, sehingga mereka terlibat aktif dalam prosesnya.” Pemerintah Desa Sowanlor telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pedoman ini mencakup RPJM, RKP, dan APBDES, yang memungkinkan kebijakan dan program pembangunan desa untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses perencanaan dimulai dengan penyusunan RPJM, diikuti dengan RKP, yang merupakan rincian dari RPJM untuk periode tahun anggaran yang bersangkutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat inisiatif dari pemerintah desa untuk menyampaikan informasi keuangan serta mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran, masih terdapat kendala dalam hal keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat. Informasi keuangan yang disampaikan belum disajikan secara mendetail dan belum mudah dipahami oleh masyarakat umum. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam aktivitas pengawasan dan evaluasi program masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah desa meningkatkan kualitas keterbukaan informasi keuangan agar lebih transparan dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Di samping itu, penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran desa, termasuk dalam pelaksanaan dan evaluasi, guna membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

## DAFTAR REFERENSI

- Afrianda, R. E., & Yuliana, L. (2025). Evaluation Situation Source Power Humans Understand Powers And Challenges. *Multidisipliner Knowledge*, 3(1), Article 1.
- Alfian, R., Yuliana, L., Perkasa, D. H., & Putra, M. F. R. (2025). Hyper-Personalization For Customer Innovativeness, Customer Involvement and Adoption Intention. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v9i1.22881>
- Amin, F. (2023). *Keuangan Pemerintah Desa Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, Dan APBDES*. Sleman: Deepublish.
- Ana, A. T. R., & Linda Lomi Ga. (2021). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72.
- Anas, M. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato. *Journal of Creative Student Research*, 2(1), 01-19.
- Athaullah, F. A., Yuliana, L., Kurniawan, A. A., Muftikhali, Q. E., Pranata, D., Manalu, C. F. D., Maulana, F. M., Novyta, N., Masnia, M., Putra, M. F. R., & Alfian, R. (2025). IMPLEMENTASI DESIGN THINKING DALAM PENGEMBANGAN SISTEM E-KOPERASI DI SMK KOSGORO BOGOR. *SUBSERVE: Community Service and Empowerment Journal*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.36728/scsej.v3i1.68>
- Bali, K., & Yuliana, L. (2024). Pengaruh Periodisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. *MASMAN: Master Manajemen*, 2(4), 71-79.

- Ega, T. N., Febrian, W. D., & Yuliana, L. (2025). Implementation of Off The Job Training in Asisi Senior High School Environment. *Multidisipliner Knowledge*, 3(1), Article 1.
- Fadhillah, R., Yuliana, L., & Perkasa, D. H. (2024). Pengaruh Pembangunan Pusat Jajanan Desa (Pujadesa) Terhadap Pengembangan UMKM Di Desa Air Mesu. *Multidisipliner Knowledge*, 2(2).
- Fadzillah, M. R., Yuliana, L., & Perkasa, D. H. (2025). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Sekolah Dasar (SD) Plus Al Huda. *Multidisipliner Knowledge*, 3(1), 94-102.
- Firdaus, A. Y. A., & Yuliana, L. (2024). Pengaruh Reputasi Merek dan Kesadaran Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Air Minum NU Berkah. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(6), 84-98.
- Fitria, R., & Yuliana, L. (2025). Analisis Lingkungan Kerja terhadap Turnover Intentions pada Karyawan PT. Spesial Gold. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.808>
- Fitriani, A. (2022). AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 20, 1.
- Hasanah Siti Wardatun, & Budi Setiawati. (2022). Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 5(1).
- Humaira, A., Yuliana, L., Putri, A. N., Muftikhali, Q. E., Suhisman, N. C., Delia, R. D. I., Clara, V., Novyta, N., Putra, M. F. R., & Alfian, R. (2025). SOSIALISASI PENGGUNAAN WADAH SEKALI PAKAI DENGAN MATERIAL ALAMI. *SUBSERVE: Community Service and Empowerment Journal*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.36728/scsej.v3i1.67>
- Jasmine, C. P. A., Yuliana, L., Amanta, N. A.-Z., Muftikhali, Q. E., Luthfiah, L., Rahmatika, A., Yosya, S. B., & Novyta, N. (2025). INOVASI CASING SMARTPHONE DENGAN TEKNOLOGI NFC. *SUBSERVE: Community Service and Empowerment Journal*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.36728/scsej.v3i1.64>
- Juliani, S., & Yuliana, L. (2025). Analysis Of Job Training Case Study Of Gibbs Technology Company. *Multidisipliner Knowledge*, 3(1), 86-93.
- Kafiyah, V. S., Yuliana, L., Sena, A. N., Muftikhali, Q. E., Sabani, Q. R., Ardani, R. A., Willyansyah, W., & Novyta, N. (2025). INOVASI TONG SAMPAH ESTETIK DALAM UPAYA Mendukung Sustainable Development Goals. *SUBSERVE: Community Service and Empowerment Journal*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.36728/scsej.v3i1.65>
- Kamaliyah, L. R., Yuliana, L., Sativa, S. O., Muftikhali, Q. E., Rahmi, R. N., Khoirudzaki, S., Safira, E., Masnia, M., Novyta, N., & Rizky, M. (2025). Pemanfaatan Limbah Plastik Berbasis Eco-Brick Di Lingkungan SD Negeri 01 Menteng. *Jurnal Pengabdian Cendekia*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.71417/jpc.v1i2.9>

- Kartika Sari, V., & Widyawati, D. (2021). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Kurniaty, D., Subagio, A., Yuliana, L., Ridwan, S., & Fairuz, H. (2023, September). Factors influencing the young entrepreneurs to implement green entrepreneurship. In *20th International Symposium on Management (INSYMA 2023)* (pp. 526-534). Atlantis Press.
- Naufal, M., & Yuliana, L. (2025). Peran Insentif dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Sagara Xinix Solusitama. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v3i2.2257>
- Oktavia, M. P., Febrian, W. D., & Yuliana, L. (2025). Implementation of Off The Job and On The Job Training in Human Resource Planning and Development. *Multidisipliner Knowledge*, 3(1), Article 1.
- Parashakti, R. D., Febrian, W. D., Tarmizi, A., Satria, E., Perkasa, D. H., & Yuliana, L. (2024). The Role of Green Human Resource Management: Analysis of Organizational Culture, Innovation and Leadership. *Dinasti International Journal of Education Management & Social Science*, 6(1).
- Poetry, K., Ardiani, N. R., & Yuliana, L. (2025). Brand Credibility and Brand Reputation on Brand Performance. *Journal of Applied Business Administration*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.30871/jaba.9078>
- Putra, M. F. R., Yuliana, L., Perkasa, D. H., & Alfian, R. (2025). Meningkatkan Penjualan Bisnis Umkm Dengan Manajemen Sosial Media. *SUBSERVE: Community Service and Empowerment Journal*, 3(1), Article 1.
- Rachman, D., Setiawan, D., & Nugraha, R. M. T. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMA Sasama. *Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 13(03), 73-86.
- Rafdi, A., Irawan, B., & Yuliana, L. (2024). Analysis of Brand Credibility to Brand Reputation in Indomie Case Study. *JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan)*, 9(3), 324-338.
- Raharjo Muhamad Mu'iz. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Ramadhanu, N. A., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pelayanan Digital Smart Branch pada Bank Mandiri Wahid Hasyim Kota Malang dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Nasabah. *Epsilon : Journal of Management (EJoM)*, 3(1), Article 1.
- Ryan, L. A., & Yuliana, L. (2025). Efektivitas Strategi Pengadaan Barang Impor dalam Industri Energi. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen Dan Ekonomi*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.71417/j-sime.v1i4.377>
- Sabilla, E. F. N., & Yuliana, L. (2025). Pengaruh Brand Awareness dan Brand Reputation terhadap Keputusan Pembelian Produk Merek Wardah. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani*, 7(1), 29-43. <https://doi.org/10.51353/jmbm.v7i1.1002>

- Saidah Hasbiyah, H., & Fatmawati, A. (2023). PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NON FISIK DI DESA PALIAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai 2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. In *Jurnal Riset Ilmiah* (Vol. 2, Issue 11).
- Saidin, & Rinanda, W. W. (2022). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Konawe. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 178–190. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.57>
- Salsabila, R. Z., Yuliana, L., & Diandra, D. (2025). Pengaruh Brand Familiarity Dan Perceived Quality Terhadap Brand Credibility (Studi Kasus Merek Skintific). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani*, 7(1), 44–57. <https://doi.org/10.51353/jmbm.v7i1.1003>
- Sarstedt, M., Joseph F. Hair Jr., & Christian M. Ringle. (2023). “PLS-SEM: Indeed a silver bullet” – retrospective observations and recent advances. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 31(3).
- Setianingsih, N. A., Asmoro, W. K., & Putranti, E. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat. *Owner*, 6(4), 3860–3869. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1127>
- Sitepu Andres Putranta. (2022). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Sumatera. Barat: CV Azka Pustaka.*
- Sobari, D., Perkasa, D. H., Wahdiniawati, S. A., Parashakti, R. D., & Yuliana, L. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Organizational Citizenship Behavior Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(5), 2696-2707.
- Subarjo, W. A. (2023). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ( STIESIA) Surabaya.
- Sufiqri, B., & Achmad. (2023). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi kasus Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep). 1(02). <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/mazinda/index>
- Sugiono, B. P., Yuliana, L., Larasati, N., & Febrian, W. D. (2025). Predicting Impulsive Buying Influenced by Hedonic Motivation and Socialization Motivation. *Jurnal Perspektif*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.31294/jp.v23i1.24879>
- Takih, T., & Yuliana, L. (2025). Implementation Of Orientation Activities For Village Heads and Staff In Bogor District. *Multidisipliner Knowledge*, 3(1), Article 1.
- Tarisca, K., Yuliana, L., & Perkasa, D. H. (2024). The Influence of Perceived Quality on Brand Credibility. *Multidisipliner Knowledge*, 2(1), Article 1.
- Thybah, U., Yuliana, L., & Perkasa, D. H. (2024). Implementasi Manajemen Keuangan Desa Madat Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas. *Multidisipliner Knowledge*, 2(2), 33-44.

- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. *MASMAN Master Manajemen*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Yakup, H., & Yuliana, L. (2025). Peran Traditional Markets dan Street Food Vendor Terhadap Pariwisata Kota Bukittinggi. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v3i2.2248>
- Yuliana, L., Apriyana, N., Fauzan, R., Larasati, N., Alhazami, L., & Sutopo, I. E. B. (2023). Analisis Minat Pembelian Produk Preloved Sebagai Upaya Peduli Lingkungan. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 21(1), 14-27.
- Yuliana, L., Azmy, A., Nurwardana, J. R., Perkasa, D. H., Alfian, R., Aisah, N., & Putra, M. F. R. (2025). The Impact of Work Stress and Job Burnout on Turnover Intention among Indonesia-China Integrated Industrial Employees. *Journal of Applied Business Administration*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.30871/jaba.8108>
- Zahrah, L., & Yuliana, L. (2025). Dampak Stres Terhadap Kinerja Karyawan pada Sektor F&B dan Keuangan. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.59603/ppiman.v3i2.803>